

Civitas akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM
MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES
 kepada wisudawan dan wisudawati Periode III Tahun 2019
SEMOGA SUKSES DALAM MERAH MASA DEPAN

Wisudawan/Wisudawati Prodi Ilmu Pemerintahan Periode III Tahun 2019



Ismi Hariyati
201210050311005



M. Galang Rahadian
201210050311005



Fajri Al Ulya
201210050311021



Madya Ridha. A
201210050311024



Gleby Angky Abeng
201210050311026



Risman Bin Laeba
201210050311029



Johansyah
201210050311032



Hasmi Muzdalifah
201210050311034



Rizky Ridzwandy
201210050311037



Bagus El Badri
201210050311054



M. Buchary Noerty
201210050311069



Bramstyo Widin
201210050311111



Arum Isto Palopi. A
201310050311041



Happy Setiyawati
201310050311066



Adi Irawan
201310050311131



Akhmad Tholabi
201310050311131



Rizal Yofei. A
201310050311175



Widie Saffitri
201410050311001



Riska Angraini. S
201410050311001



M. Ridzuan
201410050311038



Irmawati
201410050311048



Dendy Tahir. L
201410050311051



Baiq Aninnisa N.V
201410050311057



Febri Adi Tama
201410050311064



Ridho Putra Hajati
201410050311066



Dian Setyarini
201410050311072



Ardi Nugroho
201410050311085



Ade Harira. S
201410050311096



Ana Saidah
201410050311103



Puput Mahfudah
201410050311105



Wahyuni
201410050311109



Lukman Wahyudi
201410050311118



Rendika Satria W.P
201410050311121



Harun Hadiatriansyah
201410050311140



Uun Farisha Efendy
201410050311143



Albertus Aliandu
201410050311137



Dicky Wahyu. C
201410050311142



Muktaruddin
201410050311162



Tia Marwah
201510050311052



Danang Kurniawan
201510050311084



Nofianda Fatimah. A
201510050311100



M. Yusuf Putra P.A
201510050311100



Ario Andrashmara
201510050311109



Indah Dwi Maulana
201510050311131



Nadya Zelinda. F
201510050311172



Andika Galih P
201510050311180

Pengarah Redaksi : Muhammad Kamil
 Pemimpin Redaksi : Asep Nurjaman, Tri Sulistyaniingsih, Krishno Hadi, Yana S. Hijri, Saiman
 Redaktur Pelaksana : Ach. Apriyanto Romadhan
 Tata Usaha dan Dokumentasi : Jainuri, Musaddat Dwi Pramana
 Reporter : Laely Nur Khanifah, Iradhat Taqwa S.
Diterbitkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM
 Jl. Raya Tlogomas 246 Malang Telp. 0341-466318 Psw.131
 Website : pemerintahan.umm.ac.id
 Email : ip@umm.ac.id; ipumm.28@gmail.com
 Redaksi menerima tulisan mahasiswa melalui karya tulis secara bebas, dinamis, dan kreatif.
 Penyerahan naskah tulisan dimulai pada acara wisuda sampai dua minggu sebelum wisuda periode berikutnya.

Strengthening Effective Government



ProdIP News

Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-UMM

Strengthening Effective Government



Diterbitkan Oleh Prodi Ilmu Pemerintahan
 Website: pemerintahan.umm.ac.id

Edisi III/Th. XIX/Agustus/2019

Salam ProdIP News

**Memperkuat Kerjasama Internasional
 di Bidang Akademik, Riset dan Publikasi**

Pembaca Prodip News Edisi III Bulan Agustus 2019 yang budiman, sebagai upaya meningkatkan kualitas dari aspek akademik dan non-akademik bagi Dosen dan Mahasiswa, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dengan bangga menyampaikan serangkaian kegiatan Prodi dalam kurun waktu April-Juli 2019. Kegiatan akademik dan non-akademik ini terdiri dari kegiatan Nasional dan Internasional kajian-kajian keilmuan melalui berbagai gelaran kegiatan dalam pengembangan keilmuan mahasiswa dan Dosen.

Pertama, seminar Pelayanan public dan diskusi public sebagai bagian dari penguatan keilmuan mahasiswa dan Dosen dalam merespon fenomena politik dan pemerintahan. Kedua, peningkatan kualitas Prodi melalui keterlibatan pada *Workshop International Curriculums, International Accreditation & Launching Double Degree* di UMY, perancangan kebijakan strategis Internasionalisasi Prodi yang dilaksanakan melalui kegiatan FGD dan *Final Presentation Student Exchange* mahasiswa COLA KKK Thailand di IP UMM. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat yang merupakan

pengejawantahan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui edukasi kemaritiman di Kec. Dunomulyo oleh dosen Prodi IP dan pelatihan keterampilan berwirausaha terhadap mantan Orang Dengan Skizofrenia (ODS) di Desa Bandungrejo oleh tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Prodi IP.

Selain itu, pada periode Juli-Agustus Tahun 2019 ini dilaksanakan program magang riset pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kota Malang Raya, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bertepatan dengan usia Prodi IP yang sudah mencapai 33 tahun, tentu harus selalu dilakukan peningkatan dan pengembangan diseluruh aspek untuk peningkatan kualitas Prodi IP baik bidang akademik, pelayanan, maupun kompetensi civitas akademika, dan Internasionalisasi Prodi agar dapat melahirkan lulusan yang kompeten dibidang pemerintahan dan bermanfaat bagi Muhammadiyah, bangsa dan kemajuan Negara. [] * Pengarah Redaksi,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM



Muhammad Kamil, S.IP., MA
Ketua Prodi IP. FISIP UMM

Government Science Activities

**Prodi IP UMM Gelar Seminar Pelayanan Publik
 sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Bertepatan dengan tanggal 25 April 2019, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan Seminar Pelayanan Publik dengan mengusung tema "Tantangan Pelayanan Publik di Era Revolusi 4.0" yang bertempat di Aula GKB IV lantai 9. Hadir sebagai pembicara yaitu Drs. Agus Purwanto, M.Kes yang juga sekaligus menjabat sebagai Lurah Purwodadi Kota Malang dan Dr. Tri Sulistyaniingsih, M.Si selaku dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMM.

Melalui materi tentang Peningkatan Pelayanan Sektor Publik Menuju *Reinventing Government* dan *Good Government* di Era Revolusi Industri 4.0, Dr. Agus mengatakan bahwa dewasa ini masyarakat tidak lagi membutuhkan sistem layanan manual yang terkesan berbelit-belit sehingga seringkali tidak efektif dan tidak efisien. Seiring dimulainya era revolusi industri 4.0 yang mengandalkan pada teknologi digital, maka pemerintah ditantang untuk mampu menyediakan sistem layanan yang



Dari Kiri: Kaprodi Ilmu Pemerintahan Muhammad Kamil, M.A, Dr. Tri Sulistyaniingsih, M.Si, Dekan FISIP Dr. Rinikso Kartono, M.Si dan Drs. Agus Purwanto, M.Kes Lurah Purwodadi Kota Malang

lebih inovatif dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Dr. Tri Sulistyaniingsih melalui materi tentang Tantangan Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0 menyampaikan bahwa ada tiga gejala utama dalam pelayanan publik yaitu rendahnya kualitas pelayanan, birokrasi yang panjang dan tumpang tindih tugas dan kewenangan serta rendahnya pengawasan eksternal masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Oleh karena itu perbaikan kualitas

pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan seminar ini dibuka secara langsung oleh Dekan FISIP UMM yaitu Dr. Rinikso Kartono, M.Si. dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa mahasiswa merupakan penerus sekaligus sebagai pionir perubahan, harapannya di masa yang akan mahasiswa dapat menjadi pemimpin maupun birokrat yang dapat menciptakan sistem layanan publik yang lebih baik, kreatif dan inovatif. []

Strengthening Effective Government

Prodi IP selenggarakan *Final Presentation* bagi Mahasiswa *Student Exchange* dr COLA KKU - Thailand

Bersamaan dengan berakhirnya program *student exchange* mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan di College of Local Administration (COLA) Khon Kaen University (KKU) Thailand, maka berakhirnya pula masa *exchange* 4 mahasiswa COLA KKU Thailand di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM, yaitu Sittisak Kaeothanmanukun, Suparom Wongracha, Mintra Wongwirat dan Kanarwut Duangin. Program yang berlangsung selama ±4 bulan ini diakhiri dengan kegiatan *final presentation* tentang riset yang mereka lakukan selama di Indonesia yaitu tentang *Adaptation, Obstacles, Living and Well-being of Thai People in Indonesia. The Guidelines to Conserve Local Identity: a case study of Malang City, Jawa Timur, Indonesia, The Study Process Political Participation of Children and Youth in Indonesia dan The Model of Financial Preparation for The Future of Indonesian People.*

Salah satu mahasiswa COLA KKU yaitu Suparom Wongracha atau yang akrab dipanggil Joy mengatakan bahwa "suatu kebanggaan dapat belajar di sini, di Indonesia, bukan hanya belajar berbagai macam materi perkuliahan di kelas tetapi juga belajar tentang budaya-budaya Indonesia dan dapat berkenalan dengan teman-teman dari berbagai suku yang ada di



Mahasiswa COLA – KKU Sittisak Kaeothanmanukun, Suparom Wongracha, Mintra Wongwirat dan Kanarwut Duangin (dengan almamater) bersama Dosen dan Mahasiswa Prodi IP UMM

UMM. Kami juga merasakan adanya perbedaan dalam proses pembelajaran, jika di Thailand kebanyakan masih menerapkan sistem *teacher learning center* dan mahasiswanya cenderung pasif, maka di UMM yang diterapkan adalah *student learning center* sehingga mahasiswa tertantang untuk aktif selama di kelas. Kami merasa senang karena program ini telah berakhir dan kami dapat kembali ke Thailand tetapi juga sedih karena harus berpisah dengan teman-teman UMM. Oleh karena itu, kami berharap dapat berkunjung ke sini lagi di masa yang akan datang", ujarnya.

Kegiatan *final presentation* sekaligus pelepasan mahasiswa COLA KKU ini juga dihadiri oleh Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si selaku Wakil Dekan I FISIP UMM. Beliau mengatakan bahwa suatu kebanggaan dapat menerima mahasiswa asing untuk belajar di lingkungan FISIP UMM. Beliau juga berharap program ini akan terus dilaksanakan yang mana manfaatnya bukan hanya bagi mahasiswa yang bersangkutan, tetapi juga bagi prodi agar dapat mengembangkan kualitas akademiknya dan sebagai langkah awal menuju *International Department dan World Class University*. []

Prodi IP UMM terlibat dalam *Workshop International Curriculums, International Accreditation & Launching Double Degree* di UMY

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM Dr. Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si dan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Muhammad Kamil, S.IP., MA turut berpartisipasi dalam kegiatan *Workshop International Curriculums, International Accreditation & Launching Double Degree Programs* yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada tanggal 05 April 2019 bertempat di Gedung KH Ibrahim E6 lantai 5 Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan internasionalisasi program studi maupun universitas. Internasionalisasi Prodi MIP salah satunya dilakukan dengan cara *launching* program Double Degree MIP. Program *Double Degree* ini digagas agar mahasiswa dapat merasakan pengalaman belajar di luar negeri selama 1 tahun. Program ini bekerjasama dengan Asia Pasifik Society for Public Affair (APSPA),



Sesi Foto Bersama Narasumber dan Peserta dalam Workshop International Curriculums, International Accreditation & Launching Double Degree

Academics Thammasat University Thailand, Universitas Utara Malaysia, Universitas Putra Malaysia, Asia University Taiwan, Khon Kaen University dan universitas luar negeri lainnya. Internasionalisasi prodi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan bangsa Indonesia. Karena internasionalisasi bukan hanya dapat dilakukan dalam dunia pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya, tetapi juga dapat dilakukan melalui sektor pendidikan, sebab pendidikan merupakan salah satu unsur penting untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten

bagi pembangunan bangsa.

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Purwanto Subroto selaku Kasubdit Kerjasama Perguruan Tinggi Direktorat Pembinaan kelembagaan Perguruan Tinggi Ditjen Kelembagaan IPTEK DIKTI bahwasanya memperkuat hubungan internasionalisasi itu penting termasuk internasionalisasi di sektor pendidikan sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing dan bertahan menghadapi tantangan di kancah Internasional. []

Perkuat Internasionalisasi Prodi IP UMM melalui Kegiatan FGD Bersama Prodi IP UMY

Sabtu 20 Juli 2019, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM bersama dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kebijakan Strategis Internasionalisasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri", bertempat di Ruang 611 Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1 UMM. Kegiatan FGD ini sebagai upaya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan Prodi Ilmu Pemerintahan di ranah internasional. Internasionalisasi Prodi merupakan *trend* yang banyak dilakukan oleh perguruan tinggi baik oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Sebagai upaya Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berhasil meraih Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia pada tahun 2012 dan tahun 2012. Semakin bergesernya *benchmark* untuk menuju *World Class*



Dr. Dyah Mutiarin (dua dari kiri) bersama jajaran dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM dalam sesi foto bersama.

University dan Prodi IP yang mendapatkan rekognisi internasional, maka beberapa hal perlu dilakukan diantaranya adalah strategi kebijakan internasionalisasi, kerjasama luar negeri baik dengan kampus luar negeri maupun perusahaan dan pemerintah luar negeri. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, internasionalisasi Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dilakukan melalui kegiatan pertukaran mahasiswa dan Collaborasi Riset dengan College of Local Administration, Khon Kaen University Thailand. Selanjutnya, pada tahun 2019 kerjasama ini akan dikembangkan dengan kegiatan *Visiting Lecture* antara kedua institusi tersebut. Dalam rangka mengembangkan kapasitas internasionalisasi, prodi IP UMM terus bergerak dalam mengembangkan kapasitas SDM dan terus konsisten dalam pengembangan kapasitas mahasiswa dalam penguasaan Bahasa Inggris melalui Government English Club (GEC) dan pengikutsertaan mahasiswa dalam forum internasional maupun *student exchange*. []

Prodi IP Perkuat Tali Silaturahmi dengan Kegiatan Buka Puasa Bersama

Memasuki hari ke-10 dibulan suci Ramadhan tepatnya pada hari Rabu 15 Mei 2019, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang menggelar acara buka puasa bersama di RM Joglo Dau. Acara ini dihadiri oleh para dosen pengajar, staff serta keluarga besar lingkup Prodi IP UMM. Acara yang dimulai pada pukul 16.30 WIB diawali dengan sambutan oleh Kaprodi IP yaitu Muhammad Kamil, MA menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan seluruh civitas IP UMM untuk berhadir dalam kegiatan buka bersama serta



Suasana Buka Bersama Keluarga Besar IP UMM

atas komitmen dan kontribusi dalam meningkatkan eksistensi Prodi IP UMM.

Acara ini juga diisi ceramah singkat oleh Bapak Dr. Asep Nurjaman, M.Si yang juga merupakan salah satu dosen senior di Prodi IP UMM terkait dengan pentingnya membangun dan menjaga tali silaturahmi. Setelah menikmati hidangan takjil berbuka puasa yang telah disediakan, acara dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah. Sebagai agenda tahunan, kegiatan ini tentunya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara civitas Prodi IP UMM agar selalu terjalinnya komunikasi yang baik. []

Edukasi Kemaritiman dan Wawasan Bahari di Kecamatan Donomulyo oleh Dosen Prodi IP UMM

Selasa, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2019, sejumlah dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM yaitu Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si, Hevi Kurnia Hardini, S.IP., MA, Gov, Muhammad Kamil, S.IP., MA, dan Laeli Nur Khanifah, S.IP., M.IP melaksanakan kegiatan pengabdian di Kec. Donomulyo Kab. Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengabdian Masyarakat Internal (PPMI) Universitas Muhammadiyah Malang yang mana target dan sasarannya adalah masyarakat pesisir di Kec. Donomulyo Kab. Malang.

Di samping memberikan edukasi kemaritiman dan wawasan bahari, tim pengabdian Prodi IP UMM juga memberikan pendampingan, sosialisasi dan advokasi kepada pelajar di SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo. Edukasi kemaritiman yang diberikan bukan hanya tentang nelayan, tetapi juga tentang kebijakan kemaritiman, hasil laut, sarana transportasi dan lain



Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan (tengah) bersama peserta edukasi kemaritiman di SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo

sebagainya. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini tidak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir akan pentingnya pengetahuan dan wawasan kemaritiman. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai bentuk dukungan akademik terhadap kebijakan pemerintah untuk menguatkan budaya bahari.

Oleh karena itu, di Bulan Juli yang mendatang akan diadakan pelatihan pembuatan film pendek untuk para pelajar tentang potensi perikanan dan kemaritiman di Kecamatan Donomulyo sekaligus sebagai kelanjutan dari kegiatan edukasi kemaritiman yang sudah dilakukan. Manfaat dari kegiatan ini nantinya bukan hanya untuk melatih skill dan bisnis para pelajar, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana promosi SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. []

Dosen IP UMM Mengikuti *International Conference on Sustainable Innovation (IcoSI)*

Dua Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM Dr. Saiman, M.Si dan Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., MA mengikuti *International Conference on Sustainable Innovation (IcoSI)* yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 30-31 Juli 2019. Kegiatan ini diikuti oleh hampir 600 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Banyaknya peserta IcoSI tidak terlepas dari begitu bergengsinya kegiatan ini. Peserta mendapatkan E-Proceedings ISBN Selain itu paper yang terpilih akan di publikasi Proceedings di Atlantis proceeding (web of science indexed) / *Scopus Indexed Proceeding Conference*, Jurnal Terakreditasi Sinta 2 atau *Scopus*. Dr. Saiman, M.Si membahas persoalan masa depan politik islam pasca momen elektoral (Pemilu) 2019. Judul penelitiannya yakni *Identity Politics of Muslim After 'Reunion 212' at presidential Elections of 2019*. Temuan penelitiannya bahwa massa aksi 212 yang mengklaim diri sebagai representasi umat islam ternyata juga tidak memiliki pilihan politik yang tunggal. Suara mereka tersebar di beberapa partai politik seperti PKS, Gerindra, PKB, PPP dan lain-lainnya. Tidak solidnya suara ini membuat kekuatan mereka menjadi mengecil dan pada akhirnya sulit memiliki bargaining politik yang tinggi.

Sedangkan Iradhad Taqwa, S.IP., MA membahas persoalan politik gender di Partai Politik di Indonesia. Dalam penelitiannya yang berjudul *Politics of Gender in Indonesia's Political Parties*, Dosen muda IP UMM ini melihat bagaimana aktualisasi politik gender di PKS dan PDIP. Studi



Dosen Prodi IP UMM Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., MA disela-sela kegiatan IcoSI

yang mengambil lokus Kota Malang ini dilakukan secara komparatif dengan PKS sebagai representatif Islam Religius dan PDIP Nasionalis. Temuan Penelitian yang didapatkan, PDIP dan PKS Kota Malang memiliki perbedaan dalam mempraktekan politik gender. PDIP lebih terbuka berdasarkan kompetensi dan jaringan sosial, minim pada program-program pemberdayaan perempuan dan kuantitas kader perempuan sedikit. Di PDIP perempuan dapat menduduki posisi politik apapun selama memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai (jaringan dan modal sosial). Namun, program-program pemberdayaan perempuan baik untuk kader maupun non kader yang dilakukan sangat sedikit dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya meskipun tetap lekat dengan kultur patriarki, PKS memiliki banyak kader inti perempuan dan menghasilkan program terpadu pemberdayaan perempuan.

Di PKS perempuan tidak diperbolehkan menempati posisi tertinggi dalam partai yakni Presiden Partai dan Ketua Dewan Syuro. Selain itu dalam keyakinan PKS, Perempuan memiliki keterbatasan psikologis yang kurang cocok dalam politik yang keras. Lebih jauh peran utama perempuan yang utama adalah peran domestik yakni ibu. Sehingga keikutsertaan mereka dalam politik harus sejjin dan dukungan dari suami. Namun, PKS Memiliki program pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan salah satunya adalah sekolah Ibu. Kegiatan ini terbukti mampu mengembangkan kapasitas perempuan baik kader PKS sendiri maupun masyarakat lain. []

Tim PKM Prodi IP UMM Ikuti Kegiatan Money PKM 5 Bidang

Tim PKM dari Program Studi Ilmu Pemerintahan yang mendapat dana hibah dari Kemenristekdikti beserta 37 Tim lainnya yang mewakili Universitas Muhammadiyah Malang ikut serta dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2019 yang diselenggarakan di Aula Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Lantai 9 UMM (Jum'at, 12/07). Kegiatan monev ini dilaksanakan dalam rangka menentukan tim mana yang akan lolos ke tahapan selanjutnya yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-32 yang akan diselenggarakan di Universitas Udayana Bali pada Agustus yang akan datang.

Ach. Apriyanto Romadhan, S.IP., M.Si sebagai dosen pendamping kegiatan, Tim PKM dari Prodi IP UMM mempresentasikan laporan kemajuan dari program kegiatan pengabdian yang mereka laksanakan dengan judul "Transformasi ODS (Orang Dengan Skizofrenia) Melalui Keterampilan Beternak Ayam di Kelurahan Bandungrejo". "Program ini kami bentuk sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu masih banyaknya stigma negatif masyarakat terhadap ODS sehingga membatasi mereka dalam memperoleh pekerjaan. Sebelumnya



Tim PKM Prodi IP UMM dan dosen pendamping PKM

mereka juga sudah pernah berwirausaha sendiri dengan cara beternak ayam. Namun karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam beternak ayam sehingga usaha yang mereka lakukan selalu gagal karena ayam yang ditenak banyak yang mati sebelum masa produksi. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kami memberikan pelatihan yang tujuannya bukan hanya meningkatkan keterampilan ODS dalam beternak tetapi juga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan di masa yang akan datang, sehingga ODS mampu mandiri dalam hal ekonomi, serta tidak lagi bergantung terhadap orang lain", ujar Aulia selaku ketua tim PKM IP UMM.

Selanjutnya, tim melakukan sesi tanya jawab dengan tim reviewer dari Dirjen Belmawa Kemenristekdikti yaitu Dr.rer.nat I Wayan Karyasa, M.Sc dan Dra. Titiana Iriwani, M.Sn. "Alhamdulillah kami bisa menjawab seluruh pertanyaan dari reviewer serta diberikan masukan terkait dengan luaran program. Kami juga berharap diberikan hasil yang terbaik dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu PIMNAS, sehingga kami bisa membanggakan Prodi IP dan juga kampus UMM tercinta", ujarnya. □

Laboratorium IP UMM Bekali Calon Wisudawan Dengan Workshop Pemberdayaan Masyarakat

Laboratorium Ilmu Pemerintahan kembali menggelar Workshop Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Aula lantai 2 Masjid Ar-Facrudin Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 27 Juli 2019. Tujuan utama yang diharapkan dari kegiatan ini ialah mahasiswa mampu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang kompeten dan diharapkan mampu berkontribusi langsung pada program-program pemberdayaan masyarakat. Workshop pemberdayaan masyarakat ini menghadirkan 4 narasumber yang menyampaikan skema pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidangnya, serta diikuti oleh 40 mahasiswa/i yang berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Prodi Sosiologi.

Kegiatan ini berlangsung dalam dua sesi dengan masing-masing dua pembicara. Sesi pertama menghadirkan Hutri Agustino, S.Sos, M.Si dan Hesti Puspitosari, S.Sos. Hutri Agustino membedah aspek kesejahteraan sosial dan gerakan literasi. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat harus berbasis pada persoalan dan kebutuhan riil yang dialami masyarakat. Sedangkan Hesti Puspitosari, S.Sos memaparkan mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang korupsi dan kepemimpinan. Dalam paparannya beliau menyinggung bahwa pemimpin saat ini belum bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mereka hanya mempertontonkan kegaduhan politik. Beliau juga



Foto Bersama Narasumber dan Peserta Workshop Pemberdayaan Masyarakat

menyampaikan prinsip-prinsip untuk mencegah terjadinya korupsi antara lain transparansi, kewajaran, akuntabilitas, aturan main dan pengawasan penerapan aturan main.

Adapun sesi kedua menghadirkan Setyo Wahyu S, SE., ME yang fokus melihat pemberdayaan masyarakat dari aspek ekonomi dan kesejahteraan. Beliau memaparkan bahwa peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada, menginventarisir sumber daya di masyarakat selanjutnya membentuk mitra untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut untuk mengatasi permasalahan itu. Sedangkan Jamroji, S.IKOM., Medcom sebagai ahli Hubungan Masyarakat lebih banyak menceritakan kerja-kerja pemberdayaan berbasis komunikasi inovatif yang mendapatkan apresiasi dari UMM. Yang terkenal tentunya Kampung Wisata Jodipan yang mendapatkan banyak penghargaan. Dalam kesempatan tersebut Jamroji juga memberikan pemaparan tentang pemberdayaan masyarakat bidang hubungan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat fasilitator harus bisa hal-hal berikut: Analisa situasi, Menentukan tujuan, Stakeholders, Positioning dan pesan kunci, Metode dan media, Implementasi dan timetable, Budgeting, Evaluasi terakhir Manajemen Krisis dan Pertimbangan etis. □

permasalahan itu. Sedangkan Jamroji, S.IKOM., Medcom sebagai ahli Hubungan Masyarakat lebih banyak menceritakan kerja-kerja pemberdayaan berbasis komunikasi inovatif yang mendapatkan apresiasi dari UMM. Yang terkenal tentunya Kampung Wisata Jodipan yang mendapatkan banyak penghargaan. Dalam kesempatan tersebut Jamroji juga memberikan pemaparan tentang pemberdayaan masyarakat bidang hubungan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat fasilitator harus bisa hal-hal berikut: Analisa situasi, Menentukan tujuan, Stakeholders, Positioning dan pesan kunci, Metode dan media, Implementasi dan timetable, Budgeting, Evaluasi terakhir Manajemen Krisis dan Pertimbangan etis. □

Kiprah Mahasiswa

Mahasiswa IP UMM Jadi Narasumber bagi Kader RSPDBM di Kabupaten Banyuwangi

Muhammad Kanda Setia Putra, mahasiswa IP UMM yang saat ini tengah melaksanakan magang riset pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berkesempatan untuk menjadi pemateri bagi kader-kader yang terlibat dalam Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat (RSPDBM) yang diselenggarakan pada 10 Juli 2019 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.

Program RSPDBM sendiri merupakan program yang digagas oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi banyaknya permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas terutama dalam hal kesejahteraan sosial dan ekonomi. Program ini dibentuk untuk mematahkan stigma negatif masyarakat dan merubah



Muhammad Kanda saat memaparkan materi pada kader Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat (RSPDBM)

pola pikir masyarakat bahwa orang dengan disabilitas adalah aib dan tidak mampu melakukan kegiatan layaknya orang normal lainnya.

Melalui program ini, kader-kader yang berasal dari keluarga penyandang disabilitas maupun masyarakat umum diberikan pelatihan agar mampu mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi dan sumberdaya yang ada untuk mencukung terciptanya kemandirian (*self-reliance*) pada penyandang disabilitas yang nantinya akan mereka bina. Program ini juga sekaligus sebagai bentuk pendidikan kesehatan jiwa yang diberikan oleh pemerintah agar keluarga maupun masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengintegrasian penyandang disabilitas. □

Peduli Sesama, HIMAP IP Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Ulil Abshor

Minggu, 14 April 2019 bertempat di Panti Asuhan Ulil Abshor, HIMAP UMM melalui Bidang Sosial Kemasyarakatan (SOSMA) yang bergerak dibidang pelayanan pada masyarakat menyelenggarakan kegiatan bakti sosial sebagai wujud dari rasa kemanusiaan antar sesama serta sebagai manifestasi butir ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa saling menolong, dan rasa saling peduli kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak panti asuhan yang membutuhkan bantuan. Sama seperti anak-anak lainnya, anak-anak panti asuhan juga memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta hak untuk diberi kasih sayang dan perhatian.

Acara ini dihadiri oleh anak-anak Panti Asuhan Ulil Abshor baik putra dan putri, seluruh anggota HIMAP, dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, serta beberapa perwakilan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan lintas angkatan 2016-2018. Dalam kegiatan ini seluruh mahasiswa IP lintas angkatan



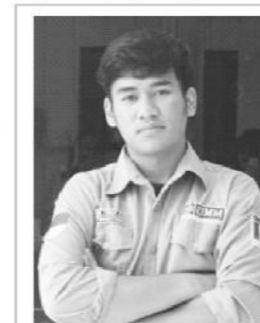
Foto Bersama dengan Anak-Anak Panti Asuhan Ulil Abshor

2016-2018 juga berpartisipasi dalam menyumbangkan pakaian layak pakai, alat tulis dan uang tunai untuk diberikan kepada pihak panti asuhan.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan pembuka oleh Erdo Amsyah selaku ketua pelaksana kegiatan bakti sosial, Nafahathir Ridwani Amin Dhana selaku ketua umum HIMAP, Bapak Iradhat Taqwa, S.IP., MA selaku perwakilan dari Ketua Prodi IP, yang kemudian dilanjutkan sambutan dari Mas Fahrul selaku pengurus panti asuhan. Kegiatan ini juga diramaikan dengan games edukasi bersama anak-anak panti seperti

games sambung ayat, games membaca asmaul husna, dan pemberian hadiah bagianak-anak yang memenangkan games. Disela-sela kegiatan juga dilaksanakan nonton film bareng, dimana film yang ditayangkan berisi pesan moral tentang pentingnya untuk tidak berputus asa dengan keadaan dan juga tetap saling mengasihi antar sesama. Terakhir acara ini ditutup dengan pemberian santunan kepada pihak panti asuhan dan bersih-bersih di area Masjid Ulil Abshor. □

Mahasiswa IP, Lolos Program Youcan Millennial Mengabdikan Kuala Lumpur-Malaysia dan Dumai, Riau, Indonesia



Imam Yusuf Abdullah

mengikuti program kegiatan yang serupa ke Polandia. *Youth Center to Act*

Prestasi membanggakan tidak hentinya ditorehkan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM. Mahasiswa Prodi IP memang terkenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya minat mahasiswa prodi IP untuk mengikuti kegiatan *volunteer* yang tidak hanya di dalam negeri namun hingga ke mancanegara.

Mahasiswa Prodi IP yang akrab disapa "Imam" ini melalui program YOUCAN Millennial Mengabdikan memperoleh kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan perlu diketahui mahasiswa Prodi IP yang lainnya juga pernah

for Nation (YOUCAN) sendiri merupakan organisasi non-pemerintah pemuda yang berbasis di Indonesia dan telah berdiri sejak 19 April 2016 dengan tujuan untuk memberdayakan pemuda serta untuk meningkatkan kesadaran di kalangan anak muda akan pentingnya partisipasi mereka dalam kemajuan bangsa.

Youcan Millennial Mengabdikan merupakan program yang digagas oleh YOUCAN guna memberdayakan para pemimpin muda yang berkomitmen dan visioner untuk berkontribusi bersama-sama untuk bangsa dan lingkungan di sekitar. Program YOUCAN Millennial Mengabdikan dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sosial untuk mengembangkan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat dari daerah pedesaan. "Kegiatan ini nantinya akan saya ikuti mulai dari tanggal 9 hingga 15 September, pertama peserta akan memperoleh workshop atau pembekalan di Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum nantinya akan diberangkatkan ke Dumai-Riau untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di sana", ujar Imam menutup pembicaraan. □

Menjadi Delegasi dalam Kegiatan Coaching Clinic Penyelenggaraan Calendar of Event Tahun 2019

Dua mahasiswa IP UMM yakni Anik Pramudya Wardhani dan Mussa Nompoh Wahyu Raja berkesempatan menjadi delegasi dari Subbidang Pengembangan Masyarakat Pariwisata, Bidang Diklat Pengembangan SDM Aparatur dan Transformasi, Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pariwisata dalam kegiatan *Coaching Clinic Event 2019* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata.

Coaching Clinic Event merupakan kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk mengangkat kualitas penyelenggaraan *Calendar of Event* (CoE) 2019 agar lebih profesional dan berstandar Internasional.

Coaching clinic event diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 17-18 Juli 2019 bertempat di Sparks Luxe Hotel Jakarta Pusat dan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya. *Coaching Clinic Event* juga digelar untuk meningkatkan kompetensi SDM kepariwisataan serta menjadi salah satu investasi Kemenpar di bidang Sumber Daya



Mahasiswa IP UMM: Anik Pramudya Wardhani dan Mussa Nompoh Wahyu Raja dalam kegiatan Coaching Clinic Event 2019

Manusia agar para praktisi pembuat acara/festival yang memiliki standar tinggi sehingga dapat meningkatkan citra, kesan dan daya tarik wisatawan terhadap Indonesia.

Coaching Clinic Event menghadirkan narasumber dari kalangan profesional seperti Denny Malik profesional di bidang *choreographer* dan *music arrangement* yang juga sebagai Kurator Bidang Festival dalam TIM CoE; Danny M. Noeranto "Ceper" ahli di bidang *stage, sounds and lighting* atau *show director*; Dewi Gontha (Dirut Java Festival Production) kompeten di bidang musik skala nasional dan internasional; Jamaludin Mahmood (*International Commissaire UCI*) di bidang *sport tourism*; dan Intan Ayundavira (*Event Director JFC*) yang berkompeten di bidang *fashion designer*. Kegiatan tersebut juga diikuti sekitar 200 orang peserta yang terdiri atas penyelenggara event/festival dari Dinas Pariwisata 34 propinsi, Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten yang terpilih, komunitas yang terpilih, dan Tim CoE 2019 Kemenpar. □

“Good Governing Poverty Alleviation” melalui Kebijakan PKH Kelompok Perempuan Mandiri dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)



Oleh: Indah Dwi Maulana

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kerap hadir di antara kehidupan masyarakat, terkhusus di negara berkembang. Kemiskinan menjadi sebuah lingkaran yang sulit ditemukan jalan untuk keluar, dengan kata lain permasalahan kemiskinan tidak hanya menggunakan satu cara saja, karena harus melibatkan berbagai sektor dan aktor dalam penanggulangannya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kota Batu sebanyak 7.980 jiwa. Perempuan menjadi salah satu aktor dalam konteks *Good Governance* sebagai *Society* yang akan diberdayakan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan Pihak swasta dalam mem-berdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan yang menjadi peserta PKH. Keberadaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) menjadi salah satu faktor kemiskinan yang selalu mengelilingi para kaum wanita sehingga dibutuhkan sebuah penanggulangan masalah kemiskinan yang melibatkan kaum perempuan di dalamnya. Perempuan yang memiliki latar belakang WRSE menjadi salah satu proses terbentuknya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berada di Kota Batu yaitu Peraturan Walikota Batu No 26 tahun 2015 tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan. Perempuan berhak menuntut sebuah pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan yang baik guna mempersiapkan generasi yang lebih baik kedepannya. Ketika kaum perempuan diberdayakan maka mereka akan mampu untuk mengentaskan diri mereka dan keluarganya dari kemiskinan. Keberadaan perempuan-perempuan yang telah memiliki embrio usaha sebelumnya berjalan pasif. Dalam kebijakan penanggulangan ini Dinas Sosial Kota Batu tidak hanya membuat kelompok dari dasar kelompok yang memiliki embrio saja, namun perempuan-perempuan yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat baik sebagai peserta maupun anggota keluarga peserta PKH yang sama sekali tidak bisa berkutik dalam hal ini dalam bidang ekonomi, itulah kemudian dimunculkannya kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk memberdayakan mereka.

Dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan ini dapat kita lihat bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk sosial yang mampu mengentaskan dirinya dan keluarganya dari kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi usaha produktif yang dibentuk dalam wadah KPM. Peran perempuan saat ini sudah tidak seperti dahulu, saat ini perempuan dipandang bukan hanya sebagai objek *sex* (*the second sex*) tetapi menunjuk pada kemandirian dan prestasi. Perempuan saat ini menjadi tonggak utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan generasi dimasa depan. Peserta PKH sudah terdata dengan jelas di Basis Data Terpadu (BDT) tersebut. Hal tersebut tentu mempermudah Pemerintah Kota Batu dalam melakukan pendataan guna untuk pendampingan, pembinaan serta pelaksanaan kebijakan ini. Dalam kebijakan ini perempuan menjadi objek dari kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui KPM tersebut. Partisipasi KPM dalam proses

pembuatan kebijakan tidak terjadi secara langsung, partisipasi KPM diwakili oleh setiap pendamping yang ada dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk kebijakan ini.

Kebijakan ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan baik namun dalam pengimplementasian atau pelaksanaannya ditingkat daerah dalam hal ini Kota Batu belum menunjukkan model integrasi karena terdapat sesuatu yang belum terwujud secara normatif. Hal yang dimaksudkan adalah belum diaturnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kebijakan ini. Kebijakan ini belum memiliki SOP dalam pelaksanaannya, saat ini kebijakan ini hanya menggunakan bentuk kemitraan berupa MoU yang dibangun bersama para pengusaha yang ada di Kota Batu. Dalam prosesnya kebijakan ini tentunya melalui beberapa tahapan dalam pembuatan dan pelaksanaannya, berikut prosesnya yaitu : 1. Penetapan organisasi pelaksana, 2. Perencanaan lingkup Dinas Sosial Kota Batu, 3. Sosialisasi, 4. Pembentukan Kemitraan, 5. Pembinaan dan pendampingan. Dalam proses pembentukan kemitraan bersama privat sektor, delapan KPM secara serentak melakukan MoU bersama privat sektor yang telah ditentukan di Kantor Dinas Sosial Kota Batu pada tanggal 3 September 2015. Setelah melewati segala proses awal hingga akhir dari kebijakan ini dalam pelaksanaannya memiliki dinamika masing-masing, baik dari KPM itu sendiri maupun dari pihak swasta yang bermitra dengan KPM. Terdapat KPM yang sampai saat ini aktif dalam kegiatannya yakni hubungan mitra Royal Orchids Garden Hotel & Condominiums dengan Ketua Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sarirejo Desa Sumberejo Kota Batu. Serta, ada juga KPM yang berhenti secara total dalam melakukan produksi usaha yang telah bermitra diawal MoU bersama privat sektor yakni hubungan mitra PT. Bunga Wangsa Sejati (Jawa Timur Park) dengan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sejahtera Mandiri Kelurahan Temas, jenis usaha ternak cacing.

Dinamika-dinamika yang terjadi dalam kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi seperti, 1. Kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini KPM masih kurang atau masih dibawah standar sehingga tidak semua KPM mampu dengan cepat dalam memenuhi permintaan privat sektor yang ada; 2. Antusiasme privat sektor yang berbeda-beda, antusias dari privat sektor sangat penting karena akan mempengaruhi jalannya kemitraan yang akan dijalankan bersama KPM nantinya, tidak dapat dipungkir bahwa setiap privat sektor pasti menginginkan *feedback* keuntungan yang akan mereka dapatkan.

Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk pemberdayaan perempuan yang berupaya untuk menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan di Kota Batu melalui peran serta peserta PKH khususnya untuk perempuan dan pihak swasta yang ada di Kota Batu. Dalam kebijakan ini perempuan dianggap penting dan cocok dalam mengentaskan kemiskinan baik bagi dirinya maupun keluarganya. Perempuan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Batu yang dimitirakan dengan privat sektor. Sasaran dalam kebijakan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan ini ialah perempuan-perempuan produktif yang menjadi peserta PKH atau sebagai keluarga penerima manfaat. Perempuan dalam kebijakan ini dianggap memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan bagi generasi dimasa depan. []

Rekonstruksi Reformasi Birokrasi Menuju *World Class Government*



Nafahatir Ridwani Amin Dhana
(201610050311035)

Tak bisa dipungkiri agenda reformasi birokrasi di negara kita menjadi PR bersama dan menjadi perhatian yang sangat serius, bila melihat budaya birokrasi yang selama ini telah terbangun bahkan sudah sejak lama negara kita menaruh perhatian khusus pada hal ini. Kondisi saat ini yang tergambarkan melalui proses rekrutmen dan budaya kerja aparaturnya membuat agenda reformasi birokrasi tidak berjalan optimal. Padahal perkembangan dunia yang semakin kompetitif dengan segala kompleksitasnya memberikan tantangan besar bagi bangsa Indonesia khususnya pada abad ke 21, salah satu tantangan itu lahir dari sektor pemerintahan sebagai mesin penggerak di dalam penyelenggaraan urusan negara.

Dengan tantangan yang semakin besar sudah

sepatutnya sebagai sebuah bangsa, negara kita harus segera bergeser untuk meningkatkan level kualitas birokrasi, agar bangsa kita mampu bersaing dan tidak kalah dengan negara lain. Untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi dapat diwujudkan dengan memperbaiki manajemen ASN/PNS dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ke dalam praktik pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar agenda reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik. Namun, tidak cukup dengan hal itu saja. Hal lain yang perlu di persiapkan oleh pemerintah adalah peningkatan kualitas serta kapasitas aparaturnya pemerintah sebagai aktor utama di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perihal peningkatan kualitas sumber daya manusia mendapatkan garansi dari Presiden Jokowi untuk 5 tahun ke

depan di masa pemerintahannya yang kedua guna menopang agenda reformasi birokrasi secara nasional, hal ini disampaikan di dalam pidato politik pertama bersama dengan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024. Pidato dengan tema “Visi Indonesia” tersebut menaruh perhatian kepada peningkatan kualitas SDM. Tentu, perhatian tersebut merupakan bentuk keprihatinan seorang pemimpin negara terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang selama ini masih dianggap belum mampu beranjak dari pengaruh budaya lama seperti praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Di dalam upaya memperkuat manajemen birokrasi sudah seharusnya budaya semacam itu di tinggalkan dan digantikan dengan budaya yang jauh lebih modern, adaptif dan transformatif. Sehingga kedepannya manusia Indonesia mampu menjadi manusia yang produktif serta tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan dunia.

Selanjutnya guna mewujudkan agenda reformasi birokrasi secara nasional ASN/PNS sebagai aktor utama memiliki peranan penting di dalam

Memperkuat Manajemen Aparatur Sipil Negara menuju *Agille Governance*



Khairul Anam
(201610050311048)

Jalan panjang perjalanan reformasi birokrasi telah dilalui dan menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Awal mula agenda reformasi birokrasi pasca 98 hingga saat ini telah berusia 21 tahun sejak awal berlakunya di negara kita, namun hingga saat ini masih saja banyak budaya-budaya yang sama sekali tidak menggambarkan upaya menuju kepada paradigma baru. Sebuah paradigma yang berupaya untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya yang berbasis etika, pelayanan prima, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bersama, tentu untuk mencapai cita-cita tersebut sulit dicapai bila tidak diupayakan dengan komitmen dan kesadaran bersama, dan apabila budaya seperti praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih terus eksis hingga saat ini

Maka tak ayal di masa pemerintahan presiden Jokowi yang menjadi fokus perhatian utama terletak dari peningkatan kualitas Sumber daya manusia yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki manajemen dan kualitas aparaturnya pemerintah. Sumber Daya Manusia atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk melanjutkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya, untuk mencapai kesejahteraan

menciptakan masyarakat yang taat hukum, demokratis, adil dan makmur. Untuk itu peran SDM aparaturnya sangat penting guna mendukung agenda reformasi birokrasi, tanpa upaya yang *sustainable* dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas SDM di negara kita tentu agenda reformasi birokrasi yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah hanya akan menjadi klise. Selanjutnya sebagai aset negara para aparaturnya pemerintah segera memiliki kesadaran untuk merubah mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja seluruh aparaturnya pemerintah serta meningkatkan kemampuan mereka sebagai tumpuan negara didalam urusan pemerintahan dengan lebih inovatif, peka, berintegritas serta profesional dengan merubah budaya organisasi secara menyeluruh serta meninggalkan cara kerja yang telah usang dengan berupaya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman guna menyongsong *World Class Government* di masa yang akan datang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjawab tantangan jaman yang semakin kompleks dan menghadirkan perubahan secara sistematis dan konsisten. []

dalam tantangan yang seimbang dan berkelanjutan. SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi birokrasi yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai permasalahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masalah penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik yang buruk. *Good Governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, dan kesinambungan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen pemerintahan rakyat, swasta dan bisnis.

Jadi manajemen sumber daya manusia dalam lingkup ASN yang di jelaskan dalam UU nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 4 yang berbunyi menjalankan tugas dan tidak berpihak dan juga mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi tetapi masih ada juga ASN yang mengabaikan tugasnya tetapi lebih memetingkan tugas pribadinya dibandingkan tugas dia sebagai pegawai negeri sipil dan dari situ ASN sendiri masih mengabaikan kepentingan yang dimaksud dalam pasal 4 tersebut oleh kare itu perlu adanya untuk redefinisi kelembagaan birokrasi termasuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan *standart operating*, juga pada bidang ketatalaksanaan perlu dipertimbangkan sistem rekrutmen dan promosi pegawai sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya dan dapat diberhentikan jika berkerja secara buruk sebagaimana yang berlaku di lingkungan swasta. []

PROFIL DAN INFORMASI PENDAFTARAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Visi Menjadikan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf internasional untuk mendukung terwujudnya *Effective Government* sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada pemerintahan daerah (*local government*) yang berdaya saing internasional.
2. Mengembangkan riset dan kajian Ilmu Pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif (*effective government*).
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*).
4. Meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TIC).
5. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan pemerintahan bagi mahasiswa agar berdaya saing internasional dan berakhlak mulia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Menguasai dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan.
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang Pemerintahan.
3. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara komprehensif dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya (*civil society*).
5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai ilmuwan dan praktisi Ilmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :

UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp.0341-464318-19 Psw. 139.
Fax. 0341-460435, 460782. e-mail:pmb@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id. call center: +62 341 463513.

Jalur Pendaftaran :

Program Jalur Undangan/ Jalur Prestasi & PMDK; Program Reguler; Program Beasiswa Khusus Yatim / Yatim-Piatu; Program Beasiswa PPUT; Program Transfer dan Alih Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

- a. Mengisi biodata peserta secara online pmb.umm.ac.id
- b. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002464 (Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Banking/ e-Banking)
- c. Formulir cetak online dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: **UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang** Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
- d. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan email.